

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 13

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 telah dibentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cirebon;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;

- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986](#) tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreg, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
6. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD, terdiri dari Sekretaris Dewan, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
11. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, yaitu :

1. Sekretariat Daerah; dan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

(1) Rincian Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :

I. *Sekretariat Daerah, terdiri dari :*

- Sekretaris Daerah, membawahkan :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1.1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Kependudukan dan Agraria.
 - 1.2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama.
 - 1.3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :

- 2.1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pembangunan dan Statistik;
 - b. Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.
- 2.2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup.
- 2.3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. Sub Bagian Penanaman Modal dan Perindustrian Perdagangan; dan
 - c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.

3. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :

- 3.1. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- 3.2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur.

- 3.3. Bagian Umum, membawahkan :
- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- 3.4. Bagian Perlengkapan dan Keuangan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Administrasi Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Pendayagunaan dan Pengendalian Aset Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan :

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf untuk membantu Walikota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas Pokok :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan kota;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kota; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Perundang-Undangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; dan
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 3. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Protokol; dan
 - b. Sub Bagian Risalah dan Hubungan Masyarakat.
 4. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran, Program dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.